

Jokowi Disebut Beri HAM Atensi Khusus di Tahun Terakhir

Tim, CNN Indonesia | Minggu, 21/10/2018 02:35 WIB



Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto).

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengklaim Presiden Jokowi bakal memberikan atensi penuh untuk merampungkan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan di satu tahun sisa pemerintahannya.

Pernyataan ini menanggapi kritik Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) yang menyebut permasalahan HAM tak menjadi prioritas selama empat tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK.

"Kami sepakat bahwa ini tetap harus menjadi atensi kita bahwa di sisa satu tahun terakhir masa pemerintahan Jokowi ini. Ada atensi khusus akan hal itu," kata Arsul saat ditemui di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/10).

Sekjen PPP itu menyatakan bahwa Jokowi telah berkomitmen sepenuhnya untuk menyerahkan persoalan itu ke pihak penegak hukum untuk menyelesaikannya.

Lihat juga: Istana Klaim Jokowi Setop 'Kutukan' Pertumbuhan Ekonomi

Sebab, kata Arsul, Jokowi-JK sebagai eksekutif tak bisa mengintervensi pihak penegak hukum, baik Kejaksaan Agung atau Kepolisian.

"Persoalannya tidak bisa disalahkan hanya pada Jokowi saja, di sana ada persoalan terkait dengan Komnas HAM, Jaksa Agung, dan DPR, jadi tidak bisa diselesaikan begitu saja," aku dia.

"Jadi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja karena penegak hukum di satu sisi sebagai bagian dari aparaturnya, tapi di sisi lain dia punya independensinya," ia menambahkan.

Lihat juga: [Ma'ruf Klaim Masalah HAM dapat Perhatian Lebih di Era Jokowi](#)

KontraS sebelumnya menyatakan isu HAM belum menjadi prioritas di masa pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi selama ini dianggap lebih mementingkan ambisi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. (rZR/osc)

EMPAT TAHUN JOKOWI-JK

Ma'ruf Klaim Masalah HAM dapat Perhatian Lebih di Era Jokowi

Tim, CNN Indonesia | Sabtu, 20/10/2018 15:28 WIB



Cawapres nomor urut 1, Ma'ruf Amin. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar).

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Wakil Presiden nomor urut 1 [Ma'ruf Amin](#) menilai permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) justru mendapat perhatian lebih selama masa pemerintahan [Joko Widodo](#)-Jusuf Kalla yang hari ini genap memasuki tahun ke-4.

Pernyataan ini menanggapi kritik Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) yang menyebut permasalahan HAM tak menjadi prioritas selama empat tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK.

"Saya pikir di zaman Pak Jokowi kasus-kasus HAM justru memperoleh perhatian dari yang sebelumnya," ujar Ma'ruf saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/10).

Selain permasalahan HAM, Ma'ruf juga melihat peningkatan penanganan kasus korupsi di masa pemerintahan Jokowi. Hal ini terlihat dari sejumlah operasi tangkap tangan yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lihat juga: 'Kerikil-kerikil' Buruh Migran di Tangan Jokowi

Kendati demikian, Ma'ruf memaklumi ada sejumlah permasalahan hukum yang belum mampu ditangani secara maksimal. "Ya tentu masih banyak yang perlu dibenahi. Saya yakin periode Jokowi kedua akan lebih optimal," katanya.

Ma'ruf turut menanggapi turunnya tingkat kebebasan beragama di Indonesia. Dari catatan KontraS, sejak tahun 2014 hingga 2018 terdapat 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama.

Ketua Umum MUI ini berpendapat, permasalahan kebebasan beragama itu tak lepas dari pengaruh radikalisme yang berkembang di tingkat global.

"Apalagi setelah ada ISIS, berpengaruh ke sini dan terjadilah gejolak-gejolak itu. Maka kita harus rapatkan barisan, menguatkan, menjaga kerukunan agar tidak terprovokasi gerakan radikalisme sampai terorisme," tuturnya.

KontraS sebelumnya menyatakan isu HAM belum menjadi prioritas di masa pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi selama ini dianggap lebih mementingkan ambisi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.

Lihat juga: Ma'ruf Amin: Jokowi Pantas Masuk 50 Tokoh Islam Berpengaruh

(osc)